

Lampiran

Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	7,3			
1	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	100%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	Kepala Bappeda
2	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	80%-100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	
1.1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota) pada Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	81%	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota) pada Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan
	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran	81%			
	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD yang didanai secara sinergi dan integratif	81%			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Rasio kegiatan RKPD Provinsi yang berbasis Partisipasi Masyarakat pada Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan yang Berbasis Partisipasi Masyarakat	81%			
	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada	Persentase Rekomendasi dan Masukan Akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD	81%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Provinsi pada Mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan				
1.1.1	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	81%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang perekonomian	9 Perangkat Daerah	<i>Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan</i>
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	81%	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan	
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	81%			
	Meningkatnya kualitas proses evaluasi lokasi kegiatan pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Persentase kegiatan yang dievaluasi kesesuaian lokasi pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	81%			
	Tersedianya sumber pendanaan pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Persentase Alokasi APBD, APBN, DAK yang tersedia pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	60%			
	Meningkatnya Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Persentase Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	81%			
	Meningkatnya kualitas keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RKPD, Keterlibatan Pemerintah Kab/Kota, serta Keterlibatan unsur legislatif dan organisasi politik dalam	Persentase usulan masyarakat dan ormas, usulan Pemerintah Kab/Kota, serta usulan unsur legislatif dan organisasi politik yang diakomodir dalam RKPD Provinsi pada mitra subbid	10%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	penyusunan RKPD Provinsi pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Pariwisata, Industri dan Perdagangan				
	Meningkatnya rekomendasi akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Jumlah rekomendasi akademisi pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	3 usulan			
	Meningkatnya Masukan Akademisi dalam Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Jumlah Masukan Akademisi pada mitra subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	3 masukan			
1.1.2	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	81%	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara Kortekrenbang Regional	<i>Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan</i>
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	81%	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan Integritas Pembiayaan Daerah	
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	81%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembnagunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	81%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen Kerangka Makro Ekonomi Daerah	
	Meningkatnya kualitas proses evaluasi lokasi kegiatan pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Persentase kegiatan yang dievaluasi kesesuaian lokasi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	81%	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	1 Buku Data dan Informasi bidang Perekonomian	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Tersedianya sumber pendanaan pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Jumlah Mitra subbidang pendanaan pembangunan yang mendapat Alokasi APBD,APBN,DAK	2 OPD			
	Meningkatnya Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis yang mendapatkan pendanaan Holistik dan Integratif pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	81%			
	Meningkatnya kualitas keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RKPD, Keterlibatan Pemerintah Kab/Kota, serta Keterlibatan unsur legislatif dan organisasi politik dalam penyusunan RKPD Provinsi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Persentase usulan masyarakat dan ormas, usulan Pemerintah Kab/Kota, serta usulan unsur legislatif dan organisasi politik yang diakomodir dalam RKPD Provinsi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	0%			
	Meningkatnya rekomendasi akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Jumlah rekomendasi akademisi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	0%			
	Meningkatnya Masukan Akademisi dalam Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	Jumlah Masukan Akademisi pada mitra subbid Pendanaan Pembangunan	2 masukan			
1.1.3	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP mitra subbid SDA dan IPTEK	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP mitra subbid SDA dan IPTEK	81%	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 laporan hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan Iptek	Kepala Sub Bidang SDA dan IPTEK
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD mitra subbid SDA dan IPTEK	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD mitra subbid SDA dan IPTEK	81%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen Potensi dan Strategi Pengembangan SDA	
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD	81%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	6 Perangkat Daerah	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	RKPD Kabupaten/Kota mitra subbid SDA dan IPTEK	Kabupaten/Kota mitra subbid SDA dan IPTEK		Pembnagunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis mitra subbid SDA dan IPTEK	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis mitra subbid SDA dan IPTEK	81%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Perangkat Daerah	
	Meningkatnya kualitas proses evaluasi lokasi kegiatan mitra subbid SDA dan IPTEK	Persentase kegiatan yang dievaluasi kesesuaian lokasi mitra subbid SDA dan IPTEK	81%			
	Tersedianya sumber pendanaan mitra subbid SDA dan IPTEK	Alokasi APBD,APBN,DAK yang tersedia mitra subbid SDA dan IPTEK	20%			
	Meningkatnya Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif mitra subbid SDA dan IPTEK	Jumlah Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif mitra subbid SDA dan IPTEK	50%			
	Meningkatnya kualitas keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RKPD, Keterlibatan Pemerintah Kab/Kota, serta Keterlibatan unsur legislatif dan organisasi politik dalam penyusunan RKPD Provinsi mitra subbid SDA dan IPTEK	Jumlah usulan masyarakat dan ormas, usulan Pemerintah Kab/Kota, serta usulan unsur legislatif dan organisasi politik yang diakomodir dalam RKPD Provinsi mitra subbid SDA dan IPTEK	3 usulan			
	Meningkatnya rekomendasi akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi mitra subbid SDA dan IPTEK	Jumlah rekomendasi akademisi mitra subbid SDA dan IPTEK	3 rekomendasi			
	Meningkatnya Masukan Akademisi dalam Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi mitra subbid SDA dan IPTEK	Jumlah Masukan Akademisi mitra subbid SDA dan IPTEK	3 masukan			
1.2	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP,RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota) pada Mitra Bidang	81%	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP,RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota) pada Mitra	Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat			Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Masyarakat
	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	81%			
	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Program prioritas Daerah RKPD Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat	81%			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Rasio Kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Berbasis Partisipasi Masyarakat	81%			
	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi dan Masukan Akademisi yang sesuai dengan Prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	81%			
1.2.1	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	81%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen (1 dok RKPD Bidang Pembangunan Manusia Subbid Kesra; 1 dok RKPD Perubahan Bidang Pembangunan Manusia Subbid Kesra)	<i>Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	81%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD	81%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	9 Perangkat Daerah	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	RKPD Kabupaten/Kota pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten/Kota pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat		pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah		
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	81%	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 laporan (Lap stunting, lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemudaan)	
	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	81%			
	Meningkatnya Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	81%			
	Meningkatnya kualitas keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RKPD, Keterlibatan Pemerintah Kab/Kota, serta Keterlibatan unsur legislatif dan organisasi politik dalam penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	Jumlah usulan masyarakat dan ormas, usulan Pemerintah Kab/Kota, serta usulan unsur legislatif dan organisasi politik yang diakomodir dalam RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	81%			
	Meningkatnya rekomendasi akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi akademisi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	81%			
	Meningkatnya Masukan Akademisi dalam Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Masukan Akademisi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Rakyat	81%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
1.2.2	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	81%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen (1 dok RKPD Bid Pembangunan Manusia Subbid Kesos; 1 dok RKPD Perubahan Bid Pembangunan Manusia Subbid Kesos)	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	81%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	81%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	4 Perangkat Daerah	
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	81%	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4 laporan (RKPD,RKT Kemiskinan, RAD SDGs, Lap SDGs)	
	Tersedianya sumber pendanaan pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Alokasi APBD,APBN,DAK yang tersedia pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	60%			
	Meningkatnya Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	81%			
	Meningkatnya kualitas keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RKPD, Keterlibatan Pemerintah Kab/Kota, serta Keterlibatan unsur legislatif dan organisasi politik dalam penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Jumlah usulan masyarakat dan ormas, usulan Pemerintah Kab/Kota, serta usulan unsur legislatif dan organisasi politik yang diakomodir dalam RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	81%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Meningkatnya rekomendasi akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Jumlah rekomendasi akademisi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	81%			
	Meningkatnya Masukan Akademisi dalam Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masukan Akademisi pada Mitra Subbid Kesejahteraan Sosial	81%			
1.2.3	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada Mitra Subbid Pemerintahan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP pada Mitra Subbid Pemerintahan	81%	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan (Ranham/KKPHAM)	Kepala Sub Bidang Pemerintahan
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada Mitra Subbid Pemerintahan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD pada Mitra Subbid Pemerintahan	81%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada Mitra Subbid Pemerintahan	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota pada Mitra Subbid Pemerintahan	81%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis pada Mitra Subbid Pemerintahan	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis pada Mitra Subbid Pemerintahan	81%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen (1 dok RKPD Bid Pemerintahan; 1 dok RKPD perubahan Bid Pemerintahan)	
	Meningkatnya Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada Mitra Subbid Pemerintahan	Jumlah Pendanaan Usulan Kegiatan yang Holistik dan Integratif pada Mitra Subbid Pemerintahan	81%			
	Meningkatnya kualitas keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RKPD, Keterlibatan Pemerintah Kab/Kota, serta Keterlibatan unsur legislatif dan organisasi politik dalam	Jumlah usulan masyarakat dan ormas, usulan Pemerintah Kab/Kota, serta usulan unsur legislatif dan organisasi politik yang diakomodir dalam RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Pemerintahan	81%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Pemerintahan					
	Meningkatnya rekomendasi akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Pemerintahan	Jumlah rekomendasi akademisi pada Mitra Subbid Pemerintahan	81%			
	Meningkatnya Masukan Akademisi dalam Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Subbid Pemerintahan	Jumlah Masukan Akademisi pada Mitra Subbid Pemerintahan	81%			
1.3	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota) pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	81%	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Tepat Sasaran	81%			
	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	81%			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rasio Kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Berbasis Partisipasi Masyarakat	81%			
	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Rekomendasi dan Masukan Akademisi yang sesuai dengan Prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Bidang	81%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
		Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
1.3.1	Meningkatnya keterkaitan program prioritas RKPD dengan program prioritas RKP urusan infrastruktur	Persentase program prioritas daerah yang terkait dengan program prioritas nasional urusan infrastruktur	81%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemabngunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	Kepala Sub Bidang Infrastruktur
	Meningkatnya Keterkaitan program prioritas RKPD dengan program prioritas RPJMD urusan infrastruktur	Persentase keterkaitan program prioritas RKPD dengan program prioritas RPJMD urusan infrastruktur	81%	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	
	Meningkatnya Keterkaitan Program Prioritas RKPD Provinsi dengan Program Prioritas RKPD Kabupaten/Kota urusan infrastruktur	Persentase Keterkaitan Program Prioritas RKPD Provinsi dengan Program Prioritas RKPD Kabupaten/Kota urusan infrastruktur	81%	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	1 Buku (database profil pembangunan bidang infrastruktur)	
	Meningkatnya data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis yang diupdate dan divalidasi urusan Infrastruktur	Persentase mekanisme evaluasi kelompok sasaran rencana kegiatan yang sesuai standar urusan infrastruktur	81%			
	Meningkatnya mekanisme evaluasi kelompok sasaran rencana kegiatan yang sesuai standar urusan infrastruktur	Persentase kegiatan yang dievaluasi kesesuaian dengan kelompok sasarannya	81%			
	Meningkatnya mekanisme proses evaluasi lokasi kegiatan yang sesuai standar urusan infrastruktur	Persentase mekanisme proses evaluasi lokasi kegiatan yang sesuai standar urusan infrastruktur	81%			
	Meningkatnya jumlah APBN untuk Sumatera Selatan urusan Infrastruktur	Persentase jumlah APBN untuk Sumatera Selatan urusan Infrastruktur	20%			
	Meningkatnya usulan kegiatan yang diakomodir dalam APBD Provinsi urusan Infrastruktur	Jumlah usulan APBD urusan Infrastruktur	50%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Meningkatnya pendanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor urusan infrastruktur	Jumlah pendanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor urusan infrastruktur	3 Usulan (Jalan, Sumber Daya Air dan perhubungan)			
	Adanya keterlibatan Pemerintah Kab/Kota dalam proses musrenbang Provinsi urusan Infrastruktur	Persentase pemerintah kab/Kota yang terlibat dalam musrenbang urusan infrastruktur	1 rekomendasi arah kebijakan			
	Meningkatnya keterlibatan akademisi sebagai narasumber FGD Perencanaan urusan infrastruktur	Jumlah rekomendasi akademisi melalui FGD Perencanaan urusan Infrastruktur	4 masukan			
1.3.2	Meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Persentase realisasi koordinasi yang direncanakan	81%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemabngunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah rapat yang dihadiri	90%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	
	Sinkronisasi tujuan Renja OPD dengan Renstra OPD	Persentase Renja OPD sesuai dengan Renstra	50%	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	
	Sinkronisasi sasaran Renja OPD dengan Renstra OPD	Persentase Renja OPD sesuai dengan Renstra	17%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Dokumen	
	Tersedianya panduan yang baik untuk penetapan lokasi kegiatan	Jumlah Panduan untuk penetapan lokasi kegiatan	1			
	Meningkatnya kualitas proses evaluasi lokasi kegiatan	Persentase kegiatan yang sesuai dengan lokasi	81%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis	70%			
	Meningkatnya kualitas keterlibatan Pemerintah Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi	Persentase usulan Pemerintah Kab/Kota yang diakomodir dalam RKPD Provinsi	70%			
	Meningkatnya rekomendasi akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi	Jumlah rekomendasi akademisi yang diakomodir dalam RKPD	1 rekomendasi arah kebijakan			
1.3.3	Meningkatnya keterkaitan program prioritas RKPD dengan program prioritas RKP urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentase program prioritas yang terkait dengan program prioritas nasional urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman Pembangunan Antara RKPD dengan RKP	81%	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemabngunan Daerah Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	<i>Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman</i>
	Meningkatnya Keterkaitan Program Prioritas RKPD dengan program prioritas RPJMD urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentase Keterkaitan Program Prioritas RKPD dengan program prioritas RPJMD urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	81%	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Keterkaitan Program prioritas RKPD Provinsi dengan Program prioritas RKPD Kabupaten/Kota urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	81%			
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis yang diupdate dan divalidasi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis yang telah diupdate dan divalidasi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	81%			
	Meningkatnya mekanisme evaluasi kelompok sasaran rencana kegiatan yang sesuai standar urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentasemekanisme evaluasi kelompok sasaran rencana kegiatan yang sesuai standar yang sudah dilaksanakan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	81%			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Meningkatnya mekanisme proses evaluasi lokasi kegiatan yang sesuai standar urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentase mekanisme proses evaluasi lokasi kegiatan yang sesuai standar yang sudah dilaksanakan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	81%			
	Meningkatnya jumlah APBN untuk Sumatera Selatan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentase jumlah APBN yang dialokasikan untuk Sumatera Selatan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	20%			
	Meningkatnya Usulan Kegiatan yang diakomodir dalam APBD Provinsi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentase Jumlah Usulan yang diakomodir dalam APBD Provinsi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	50%			
	Meningkatnya pendanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Jumlah kelompok usulan pendanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	3 Kelompok usulan (Air, Minum, Sanitasi dan Perumahan)			
	Adanya keterlibatan Pemerintah Kab/Kota dalam proses Musrenbang Provinsi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Jumlah Rekomendasi Pemerintah Kab/Kota dalam proses Musrenbang Provinsi urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	1 rekomendasi arah kebijakan			
	Meningkatnya keterlibatan akademisi sebagai narasumber FGD Perencanaan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Jumlah masukan akademisi sebagai narasumber FGD Perencanaan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman	3 masukan			
1.4	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota) pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	80%-100%	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis
	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pengendalian,	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan	80%-100%	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase data dan informasi kelompok sasaran	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang Tepat Sasaran	Perencanaan Strategis yang Tepat Sasaran		Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	yang sesuai dengan isu strategis	
	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang didanai secara sinergi dan integratif	80%-100%	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD	Rasio kegiatan RKPD Provinsi yang berbasis partisipasi masyarakat	88%	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi sistem perencanaan yang digunakan	
	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang diakomodir dalam RKPD Provinsi	80%-100%			
2.1	Tahapan Penyusunan RKPD yang Tepat Waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	100%			
	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi	81%			
	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pencapaian pemenuhan fungsi belanja pendidikan dan kesehatan dalam RKPD Kab/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi fungsi pendidikan dan kesehatan	80%-100%			
2.1.1	Tercapainya Target Kegiatan OPD Provinsi	Persentase Kegiatan OPD provinsi yang Mencapai Target	80%-100%	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	2 Dokumen (Dokumen PK Gubernur dan Dokumen RKT Provinsi Sumsel)	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan
	Meningkatnya kualitas hasil evaluasi RKPD Provinsi	Persentase OPD yang mendapat rekomendasi perbaikan kinerja target program	1-5%	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	14 Laporan (12 Laporan Realisasi APBD, APBN dan DAK; 2 Laporan Evaluasi Renja PD)	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Tercapainya Target Perjanjian Kinerja OPD	Persentase OPD yang mencapai target perjanjian kinerja	80%-100%	Pengelolaan data dalam sistem informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen Updating Aplikasi e-Monev	
	Meningkatnya Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBD dan APBN Kab/Kota	Frekuensi Rapat Koordinasi	3-4 kali	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Kerjasama	
2.1.2	Meningkatnya kualitas hasil evaluasi RKPD Provinsi	Persentase OPD yang mendapat rekomendasi perbaikan kinerja target program	88%	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kab/Kota	4 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperkada RKPD Kab/Kota 2025 dan Perubahan 2024; 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab/Kota; 1 Dok Evaluasi ranhir Raperda RPJMD kab/Kota 2025-2030; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Sriwijaya Kab/Kota)	<i>Kepala Sub Bidang Evaluasi</i>
	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase Rata-rata Keterkaitan Prioritas Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota) pada Mitra Subbid Evaluasi	88%			
	Meningkatnya kualitas Fasilitasi RKPD Kabupaten Kota	Persentase RKPD Kabupaten/Kota yang difasilitasi sesuai standar	88%			
	Meningkatnya kualitas evaluasi RAPBD kabupaten/kota (cross cutting BPKAD)	Persentase RAPBD kabupaten/kota yang di evaluasi sesuai standar	88%			
2.1.3	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RKP	88%	Penerapan sistem informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disediakan	<i>Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis</i>
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD dengan RPJMD	88%	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen rancangan Teknokratik RPJPD Tahun 2024-2045	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Meningkatnya Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	Persentase Keterkaitan Prioritas Pembangunan Antara RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	88%	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara Konsultasi Publik RPJPD tahun 2024-2045	
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	Persentase data dan informasi kelompok sasaran yang sesuai dengan isu strategis	88%	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 dokumen (1 Dok Penyusunan RKPD; 1 Dok Perubahan RKPD)	
	Meningkatnya rekomendasi dan masukan akademisi dalam tahapan penyusunan RKPD Provinsi	Jumlah rekomendasi dan masukan akademisi	80%			
	Meningkatnya kualitas keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RKPD, Keterlibatan Pemerintah Kab/Kota, serta Keterlibatan unsur legislatif dan yang sesuai penyusunan RKPD Provinsi	Jumlah usulan masyarakat dan ormas, usulan Pemerintah Kab/Kota, serta usulan unsur legislatif dan yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi	88%			
	Tahapan penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase tahapan proses penyusunan RKPD Provinsi Sesuai Kalender Perencanaan	81%			
1.5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BAPPEDA	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat/berkembang	Sekretaris Bappeda
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai Sakip Bappeda	AA (91,50)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	
		Persentase Temuan Keuangan dari Pemeriksa terhadap kegiatan di Bappeda pada tahun berjalan	9%	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan penunjang ASN	Indeks Profesionalisme ASN	55%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	
1.5.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Keuangan yang Berkualitas	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAI	81%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Meningkatnya Pengendalian Internal Keuangan Bappeda	Persentase Temuan Keuangan dari Pemeriksa terhadap kegiatan di Bappeda pada tahun berjalan	9%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu dan akrual	81%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang Workshop Keuangan dan Perencanaan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
1.5.2	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bappeda	Nilai Sakip Bappeda	AA (91,50)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	<i>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</i>
	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bappeda yang disusun tepat waktu	100%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang Workshop Keuangan dan Perencanaan	
	Terlaksananya Forum PD dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan	Berita Acara kesepakatan Forum PD dan Berita Acara kesepakatan Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen (pengelolaan website)	
	Terlaksananya pengelolaan Website dan Media Sosial Bappeda	Laporan Pelaksanaan Monitoring Website dan Media Sosial Bappeda	1 Laporan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara Forum SKPD	
				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Bappeda	
1.5.3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM BAPPEDA	Nilai Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN	55%	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (Polis asuransi)	<i>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>
	Terpenuhinya ruang lingkup objek penilaian Standa Manajemen Mutu Bappeda	Persentase Standar manajemen Mutu yang terpenuhi	81%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikuti Diklat PIM)	
	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian	81%	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	135 orang (Pegawai yang mengikuti uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan 130 orang)	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung Perencanaan dan Operasional perkantoran	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana	81%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 org Bimtek Kepegawaian dan aset; 100 orang workshop Anjab&ABK; 100 orang workshop penyusunan angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 Paket	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16 Paket	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan&perlengkapan kantor) 1 Unit (gedung kantor)	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Penanggung Jawab
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		